

ANALISIS PRODUKSI PERIKANAN LAUT, BUDIDAYA LAUT, TAMBAK, DAN KOLAM, PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN REMBANG

***ANALYSIS OF MARINE FISHERIES PRODUCTION, MARINE FARMING,
FISHPOND, CAPTURE FISHERIES
IN REMBANG DISTRICT***

Soebandriyo

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Jl. Imam Bonjol 190 Semarang. Telp. 024 3540025. Fax. 024 3560505

Email: rioavanza2004@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar, menempati peringkat ketiga di Jawa Tengah setelah Pekalongan dan Pati. Perikanan laut merupakan sektor perekonomian utama di Kabupaten Rembang. Kurangnya infrastruktur yang memadai bagi nelayan serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan menjadi tantangan sektor perikanan. Kabupaten Rembang memiliki rencana bertahap mewujudkan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dengan program khusus berupa Perencanaan Kawasan Maritim Terpadu. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis kondisi perikanan laut di Kabupaten Rembang, 2). Untuk menganalisis kondisi usaha perikanan di Kabupaten Rembang, dan, 3). Menganalisis kondisi budidaya laut dan tambak di Kabupaten Rembang. Informan dalam penelitian ini adalah aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang, Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), dan pelaku industri pengolah ikan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di sektor perikanan tidak selalu menguntungkan bagi nelayan. Kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan memberikan intensif pada usaha perikanan belum menyentuh nelayan kecil, terutama nelayan pekerja. Bantuan berupa modal atau peralatan seperti perahu, mesin perahu, alat tangkap, dan peralatan pendukung lainnya tidak dapat diakses nelayan kecil.

Kata kunci : Perikanan, Nelayan, Rembang.

ABSTRACT

Rembang District have marine fishery potential is enormous, ranks third in Central Java after Pekalongan and Pati. Marine fisheries is a major economic sector in Rembang. But, lack of adequate infrastructure for fishermen as well as the lack of knowledge and skills to be a challenge fisheries sector. Rembang District Government have a phased plan to realize the development of marine and fisheries with special programs such as the Integrated Maritime Region Planning. The purpose of this study were: 1). To analyze the

state of marine fisheries in Rembang, 2). To analyze the state of fisheries in Rembang, and, 3). Analyzing mariculture and pond conditions in Rembang. Informants in this study is the officers of Department of Fisheries and Marine of Rembang District, officer of fish auction (TPI), officer of KUD, and the fish processing industry. The results of analysis of this study showed that various government policies in the sector is not always profitable for fishermen. The Ministry of Fisheries and Marine Policy provides intensive on fishing effort has not touched a little fishing, especially fishing workers. Aid in the form of capital or equipment such as boats, boat engines, fishing gear, and other ancillary equipment not accessible to small fishermen.

Keywords : Fishing, Fisherman, Rembang

PENDAHULUAN

Gersang, kering, panas. Itulah saat kali pertama kita menginjakkan kaki di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Rona wajah kabupaten di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah itu kian terasa ketika melewati jalan pantai utara Pulau Jawa jalur Semarang-Surabaya saat musim kemarau. Dari jalur ini pula tampak petak-petak lahan tempat pembuatan garam yang terhampar dipinggir pantai pesisir utara. Sebuah sisi lain wajah kabupaten penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Di balik itu, sebenarnya letak Kabupaten Rembang yang identik dengan Pantai Kartini sebagai Icon Wisatanya, dan konon di sinilah Pahlawan R. A. Kartini suka berwisata di sini, memang strategis dan berpotensi cukup besar kemaritimannya. Bentangan pantai sepanjang 65 kilometer dari Kecamatan Kaliori hingga Kecamatan Sarang merupakan kekayaan alam tersendiri yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber mata pencaharian. Ada 33.578 tenaga kerja mulai dari nelayan yang terdiri atas juragan, pandega, hingga bakul ikan terlibat didalam usaha perikanan laut maupun tambak. Dengan sarana perahu dan alat penangkap ikan yang sederhana, perikanan memberi kontribusi 6,46% bagi PDRB tahun 2011, namun memiliki prospek yang menjanjikan. Perikanan laut Rembang memang nomor dua terbesar se-

Jateng setelah Kota Pekalongan. Tiga belas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di kabupaten ini. Tahun 2011, 13 TPI tersebut mampu menghasilkan 51.365 ton ikan senilai Rp. 115,71 miliar. Hasil itu dipasarkan sampai ke luar Jawa, seperti Lampung, Jambi, dan sekitar Sumatera bagian tengah, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, eksport masih dilakukan lewat Semarang dan Surabaya, karena Rembang belum memiliki perwakilan ekspor. Untuk pemasaran di Jawa, selain ke kabupaten tetangga, juga ke Yogyakarta dan Semarang. Lewat retribusi pungutan hasil perikanan, sumbangsih sektor perikanan bagi pendapatan asli daerah mencapai hampir Rp. 1 miliar tiap tahunnya. Potensi laut yang demikian besar agaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Rembang. Terlihat dari upaya yang hingga kini masih digarap yakni pengembangan kawasan bahrani terpadu. Sebuah kawasan bahrani yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung. Di masa depan perikanan dan kelautan tampaknya sangat bisa diandalkan. Sesuai dengan letak geografis wilayah, Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan (baik darat maupun laut) yang sangat potensial. Khususnya sektor perikanan laut, Kabupaten Rembang menempati peringkat ke III sewilayah

Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pati. Kawasan Bahari Terpadu mencermati hal yang demikian, maka sektor perikanan laut menjadi salah satu diantara andalan guna pengembangan ekonomi daerah. Dalam upaya ini pemerintah Kabupaten Rembang berencana secara bertahap mewujudkan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dengan suatu program khusus yakni Penataan Kawasan Bahari Terpadu.

Kawasan Bahari Terpadu (KBT) merupakan suatu program Pemerintah Kabupaten Rembang dalam upaya mewujudkan penataan kawasan pantai yang menyeluruh untuk mendukung pembangunan daerah secara umum. Visi Kawasan Bahari Terpadu adalah "Kegiatan pengembangan dan pembangunan Kawasan Pantai yang Terpadu multi sektor, sehingga Kota Rembang menjadi Kota Pantai Unggulan yang Tumbuh (*Growth Pole*), Menggembirakan (*Excitement*) dan Menguntungkan (*Profit*) serta menjadi Pusat Pertumbuhan Pantura Timur Jawa Tengah. Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi penataan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) antara lain:

- 1) Membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai sentra kegiatan perikanan dan menjadi daya tarik kegiatan perikanan lain serta kegiatan perekonomian lainnya.
- 2) Membangun Pelabuhan Niaga untuk mewadahi kegiatan yang selalu meningkat serta memperlancar hubungan perdagangan antar pulau melalui Pelabuhan Rembang, Pelabuhan Tasik Tanjung Agung, Kabupaten Rembang
- 3) Mengembangkan dan membangun Pantai Kartini sebagai kawasan wisata air & rekreasi sehingga terpadu dengan pengembangan pantai.
- 4) Meningkatkan kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Nelayan

melalui penataan peningkatan sarana dan prasarana dasar pemukiman sehingga akan meningkatkan kinerja nelayan.

- 5) Meningkatkan pendapatan, pengembangan mata pencaharian dan lapangan kerja, kesempatan dan kegiatan usaha masyarakat dengan peningkatan roda perekonomian masyarakat skala menengah, kecil dan koperasi dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Menghapus Kemiskinan.
- 6) Memberdayakan Masyarakat dengan pengembangan dan refungsionalisasi lembaga-lembaga masyarakat serta menciptakan peluang pengembangan kegiatan sehingga masyarakat secara mandiri aktif merencanakan, melaksanakan dan memelihara lingkungannya.
- 7) Pelestarian dan Revitalisasi Kawasan Pantai Tasik Agung - Pantai Kartini sebagai bagian sejarah dan kekayaan kota serta merupakan Jantung Hati Wisata Pantai Kota Rembang.
- 8) Menciptakan Tertib Pembangunan dan Tertib Hukum sehingga Pengembangan Kawasan Pantai Terpadu Tasikagung – Pantai Kartini dapat terarah, lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kota dan masyarakat Rembang

Perikanan Laut Potensi yang dimiliki kabupaten Rembang pada dasarnya sangat besar, antara lain mempunyai wilayah laut dengan pantai sepanjang kurang lebih 65 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah. Disamping itu juga ditunjang oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Sesuai dengan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang terdapat Juragan kapal sebanyak 2.985 orang, Pandega

sebanyak 12.271 orang dan penduduk yang bermata pencaharian sambilan sebagai nelayan sebanyak 1.648 orang. Dengan berbagai upaya secara maksimal dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan dan potensi laut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksplorasi potensi kelautan, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Sesuai data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang, potensi perikanan laut bisa mencapai antara 51.365.389 kg hingga 55.281.457 kg atau senilai Rp. 115.710.052.200,- hingga nilai jual Rp. 117.954.569.100,-. Untuk budidaya laut, terdapat sekitar 25 Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Kecamatan Rembang dengan jenis kegiatan budidaya ikan Karapu (Karamba Jaring Apung) dan beberapa kegiatan budidaya tanaman rumput laut di Kecamatan Kaliori dan Sluke. Industri Pengolahan Ikan Industri pengolahan ikan terdapat di wilayah kecamatan di sepanjang pantura, dengan jenis berbagai produksi mulai dari ikan asap, pindang, ikan kering sampai dengan ikan beku. Pemasaran hasil produksi industri pengolahan ikan, disamping untuk konsumsi masyarakat disekitarnya, juga untuk mencukupi kebutuhan ikan secara regional, nasional maupun internasional. Ikan kering dan ikan beku di eksport ke berbagai negara asing, seperti Amerika, Korea, Jepang, Colombo dan lain-lain. Usaha lain yang patut mendapat perhatian adalah industri garam rakyat. Sentra garam di Kecamatan Kaliori dan kecamatan lain di pesisir. Lahan penggaraman umumnya tidak terlalu jauh dari garis pantai. Total luas areal penggaraman 1.184,9 hektar, tersebar di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Sarang, dan Kragan. Garam curah (kerosok) atau garam rakyat yang

dalam proses produksi hanya mengandalkan air laut, bisa dihasilkan hingga 147.975 ton, nilainya Rp. 29,59 milyar. Ada pula produk garam briket yang produksinya 18.000 ton senilai Rp. 8 milyar. Ada 777 industri garam kerosok yang menyerap 5.545 tenaga kerja, dan empat industri garam briket dengan 260 tenaga kerja.

Dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut, kegiatan penangkapan merupakan ciri yang cukup menonjol pada umumnya, namun keberhasilan usaha penangkapan tersebut mengandung ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian ini disebabkan oleh ketersediaan dan potensi sumberdaya ikan yang memiliki variasi spasial dan temporal yang tinggi, terlebih apabila tingkat pemanfaatan telah melampaui potensi lestarinya sehingga bukan saja hasil tangkapan akan semakin menurun, tetapi juga menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya ikan. Akibatnya keberhasilan usaha penangkapan bersifat sangat risikan dibanding usaha perikanan lainnya, utamanya budidaya perikanan. Usaha budidaya perikanan dapat berfungsi nyata dalam penyediaan produk perikanan secara kontinyu dan terencana serta pengurangan tekanan eksploitasi terhadap jenis-jenis biota hayati yang dapat dibudidayakan.

Perencanaan pengembangan budi daya laut di Indonesia masih banyak mengalami kesulitan. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan perairan yang tidak cocok bagi kegiatan budidaya laut selain data parameter kualitas air yang tidak sesuai di lokasi tersebut untuk kegiatan budidaya. Oleh karena itu, agar kegiatan budidaya laut dapat berkembang dengan baik, diperlukan analisis penentuan lokasi yang sesuai serta didukung oleh analisis data yang baik dan benar bagi kondisi perairan yang ideal. Jenis-jenis perairan yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya laut di

antaranya adalah teluk, teluk kecil (*inlet*), selat, perairan karang, goba (lagoon), pantai terbuka, dan laut lepas. Tentu saja setiap jenis perairan ini mempunyai keuntungan dan kerugian dalam pengembangannya. Menurut Set dan moluska masih sangat besar. Luas total perairan laut yang potensial untuk budidaya ikan (kakap, kerapu, dan beronang) sekitar 1.052.720 ha dan untuk budidaya moluska (kerang dan teripang) sekitar 720.500 ha. Dari luas perairan laut yang ada tersebut potensi produksi yang dapat dihasilkan diperkirakan sekitar 46.000 ton/tahun. Adapun potensi lahan budidaya rumput laut (alga) mencapai 22.460 ha yang tersebar di seluruh di Indonesia. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 524/128/ 1983, menetapkan beberapa lokasi di Jawa Tengah berpotensi untuk dikembangkan budidaya laut. Salah satunya adalah Kabupaten Rembang. Di samping itu di perairan Rembang banyak ditemukan spesies-spesies kultivan yang potensial untuk dibudidayakan karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti jenis-jenis ikan bersirip (dengan panjang pantai yang mencapai 60 km dan keberadaan 19 terumbu karang sebagai pelindung alami bagi perairan Rembang dari gelombang dan arus secara langsung dari laut Jawa, sehingga pada beberapa lokasi merupakan perairan tenang terutama di wilayah kecamatan Kaliori, dimana sebagian besar pulau karang terdapat di wilayah ini (Dinas Perikanan dan Kelautan Rembang, 2002 Kerapu, Kakap, Beronang), berbagai jenis kerang, rumput laut, udang-udang, dan sebagainya. Dilihat dari besarnya potensi perairan pantai yang dimiliki Kabupaten Rembang, maka sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai daerah pengembangan budidaya laut, walaupun di beberapa daerah, karakteristiknya bervariasi terutama melihat kondisi hidrometeoroseanografis. Oleh karena

informasi tentang lokasi perairan laut di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut, masih sangat terbatas, maka suatu studi penyusunan dan pemetaan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut di Kabupaten Rembang sangat mendesak untuk dilakukan. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain belum diketahuinya potensi sumberdaya laut, letak lokasi perairan laut yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut, jenis n) yang dapat dibudidayakan yang sesuai dengan kondisi perairan, tempat lokasi budidaya yang potensial serta pemilihan teknologi budidaya yang sesuai dan fasilitas pendukung (infrastruktur) yang dapat menjamin keberhasilan usaha budidaya laut. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dan inventarisasi lokasi yang potensial untuk kegiatan usaha budidaya laut baik di perairan pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah, dengan tujuan mengukur potensi sumberdaya budidaya laut, memetakan dan menentukan lokasi potensi budidaya laut, menyusun rekomendasi lokasi budidaya laut yang potensial dan merekomendasikan jenis komuditas unggulan satu rancang bangun teknologi budidaya yang cocok dengan kondisi perairan dimana lokasi budidaya akan dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kesesuaian perairan yang potensial, jenis komuditas unggulan, dan rancang bangun teknologi budidaya laut yang akan digunakan untuk pengembangan perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Rembang, dimana pendapatan para nelayan akan meningkat sehingga para nelayan dapat menabung dan akhirnya kesehatan para nelayan akan meningkat lagi dan yang nantinya akan digunakan meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang ada.

Dari penjelasan uraian diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah

dalam penelitian ini, yaitu: 1).Bagaimana kondisi perikanan laut di Kabupaten Rembang?, 2).Bagaimana kondisi usaha perikanan di Kabupaten Rembang?, 3).Bagaimana kondisi budidaya laut, tambak dan kolam di Kabupaten Rembang?

MATERI DAN METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif, Obyek penelitian, Analisis data bersifat terbuka, *opened-ended*, dan induktif. Dikatakan terbuka karena teknik *sampling purposive* (bertujuan). Jadi sampel dalam penelitian ini antara lain adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan, BAPPEDA, Pengolah ikan, Penyuluh lapangan, Nelayan Kabupaten Rembang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama (Primer) dan data pendukung (Sekunder). Data utama diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Dinas Perikanan Dan Kelautan, BAPPEDA, Penyuluh lapangan, Pengolah ikan, dan Nelayan . Sedangkan data pendukung bersumber dari dokument-dokumen resmi yang ada, baik berasal dari BPS, Bappeda maupun Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Rembang. Pemilihan informasi yang tepat dengan informasi yang akurat merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti.

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik: 1.Wawancara mendalam (*indepth interview*), 2. Observasi partisipasi, 3. Dokumentasi, dan 4. Kuesioner Adalah teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan baik yang bersifat tertutup maupun terbuka. Pada penelitian

ini menggunakan kuesioner terbuka dengan tujuan agar informan memiliki beberapa alternatif jawaban yang bisa dikembangkan. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak menggunakan *stratified sampling*, sampel mewakili pada semua tingkatan atau strata dan pemilihan sampel bertujuan untuk target tertentu dalam memilih sampel menggunakan teknik *purpose sampling*, sehingga elemen sampling tidak memiliki kesempatan sama untuk menjadi sampel. Metode sample ini merupakan salah satu sampel probabilitas. (Indriantoro dan Supomo, 1999:131). Sampel yang diambil adalah dengan tujuan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari *stakeholder* terdiri dari unsur: Bappeda, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Pengolah ikan, dan 4. Nelayan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi. Data primer yang terkumpul harus segera dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif versi Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil.

a. Luas Wilayah.

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km² dengan panjang garis pantai 63,5 km. 35% dari luas wilayah Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km².

b. Letak.

Kabupaten Rembang terletak di antara 111°00' – 111°30' Bujur Timur dan 06°30' – 07°00' Lintang Selatan dengan 14 wilayah kecamatan yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang,

Sale, Sedan, Gunem, Pamotan, Sulang, Sumber, Bulu, Pancur.

c. Administrasi.

Secara administrasi, Kabupaten Rembang berbatasan dengan: Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Selatan : Kabupaten Blora, Sebelah Barat : Kabupaten Pati, dan Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur)

B. Pembahasan.

a. Perikanan Laut.

Potensi, antara lain mempunyai wilayah laut dengan pantai sepanjang ± 65 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah. Disamping itu juga ditunjang oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan, (dengan perincian Juragan sebanyak 2.985 orang, Pandega sebanyak 12.271 orang dan penduduk yang bermata pencaharian sambilan sebagai nelayan sebanyak 1.648 orang). Dengan berbagai upaya secara maksimal dapat mengeksplorasi dan mengeksplorasi kekayaan dan potensi laut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksplorasi potensi kelautan, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2010 produksi perikanan laut mencapai 51.365.389 kg atau senilai Rp. 115.710.052.200,- sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 55.281.457 kg dengan nilai jual Rp. 117.954.569.100,-

Panjang pantai 63,5 km mempunyai potensi laut yang dapat dikembangkan. Perairan laut mempunyai kekayaan sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi, antara lain ikan Layang, Kembung, Tembang, Tongkol, Bawal,

Tenggiri, Teri, dan Kakap. Jenis-jenis ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan alat tangkap dan kapal penangkap yang berlainan sesuai dengan karakteristik dari jenis-jenis ikan tersebut. Untuk mendukung pengoptimalisasian potensi perikanan laut tersebut, maka disediakan sarana prasarana perikanan laut, di antaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Di Kabupaten Rembang terdapat 10 TPI, yaitu: 1. TPI Tunggulsari, 2. TPI Tanjungsari, 3. TPI Tasikagung, 4. TPI Pasarbanggi, 5. TPI Pangkalan, 6. TPI Pandangan, 7. TPI Bakung, 8. TPI Karang Lincak, 9. TPI Karang Anyar, 10. TPI Sarang. Dari 10 unit TPI tersebut, 1 di antaranya merupakan PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), yaitu PPP Tasikagung. Sedangkan 2 unit, yaitu Karang Anyar dan Sarang masuk dalam kategori PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan).

b. Produksi Perikanan Laut Di Kabupaten Rembang Berdasarkan Jenis Ikan.

Pada tahun 2011 jumlah produksi perikanan laut dengan jenis ikan layang yang jumlahnya 14.501.181 Kg, nilai produksi Rp. 74.457.675.330,- ikan bawal hitam yang jumlahnya 721.466 Kg, nilai produksi Rp. 15.328.958.960,- jenis ikan kembung yang jumlahnya 3.577.601 Kg, nilai produksi Rp. 39.901.831.200,- jenis ikan selar yang jumlahnya 3.014.016 Kg, nilai produksi Rp. 24.882.747.140,- jenis ikan tembang/jui yang berjumlah 5.203.009Kg, nilai produksi Rp. 18.161.615.500,- , jenis ikan tongkol jumlahnya 2.269.405 Kg, nilai produksi Rp. 20.217.241.740,- jumlah jenis ikan tengiri yang berjumlah 201.739 Kg, nilai produksi Rp. 4.825.516.600,- jenis ikan cumi-cumi berjumlah 970.771 Kg, nilai produksi Rp. 16.270.875.010,- jenis ikan petek yang berjumlah 2.448.791 Kg, dengan nilai produksi Rp. 5.430.740.750,- jumlah produksi perikanan laut dengan

jenis ikan tiga waja yang berjumlah 99.328 Kg,dengan nilai produksi Rp. 105.146.750,- jumlah produksi perikanan laut dengan jenis ikan ekor kuning dengan jumlah 828.850 Kg,dengan nilai produksi Rp. 2.201.951.350,- jumlah produksi perikanan laut dengan jenis ikan kurisi tidak ada tangkapan sama sekali, jumlah produksi perikanan laut dengan jenis ikan pari/peh dengan jumlah 698.851 Kg,dengan nilai produksi Rp. 3.129.076.130,- jumlah produksi perikanan laut dengan jenis ikan layur dengan jumlah 139.338 Kg,dengan nilai produksi Rp. 969.511.980,- jenis ikan kapasan jumlah 1.282 Kg, nilai produksi Rp. 7.688.430,- jenis ikan demang/swanggi jumlah tangkapan 3.381.160 Kg, nilai produksi Rp. 7.992.577,- jenis ikan barakuda/tunul jumlah tangkapan 33.269 Kg, dengan nilai produksi Rp. 8.156.845.000,- Tidak diketahui, jenis ikan bentong jumlah tangkapan 1.013.460 Kg, nilai produksi Rp. 2.044.686.050,- jenis ikan biji nagka jumlah tangkapan 678.732 Kg, dengan nilai produksi Rp2.044.686.050,-

Jenis ikan balak/beloso jumlah tangkapan 630.509 Kg, nilai produksi Rp. 1.689.709.350,- jenis ikan manyung dengan jumlah tangkapan 629.234 Kg, nilai produksi Rp. 2.644.467.100,- jenis ikan kakap merah dengan jumlah tangkapan tidak ada, jenis ikan teri jumlah tangkapan yang didapat 50.730 Kg, nilai produksi Rp. 502.981.550,- jenis ikan udang hasil tangkapan 1.238 Kg, nilai produksi Rp. 45.420.000,- jenis ikan lemadang dengan jumlah tangkapan 10.507 Kg, nilai produksi Rp. 126.820.000,- jenis ikan rajungan jumlah tangkapan yang didapat tidak ada, jenis ikan lemuru dengan jumlah tangkapan 3.860 Kg, nilai produksi Rp. 53.004.000,- jenis ikan kerapu dengan jumlah tangkapan 774.297 Kg, nilai produksi Rp. 2.869.724.690,- jenis ikan siro jumlah tangkapan 36.245

Kg, nilai produksi Rp. 168.865.000,- jenis ikan kwee hasil tangkapan 988.534 Kg, nilai produksi Rp. 3.222.979.550,- jenis ikan lain-lain artinya campuran hasil tangkapan 6.371.521 Kg, nilai produksi Rp. 19.417.570.165,- jumlah seluruh produksi perikanan laut pada tahun 2011 hasil tangkapan 50.264.166 Kg nilai produksi seluruhnya meliputi Rp. 277.318.359.250,-

c. Jumlah Nelayan.

Tahun 2011 nelayan yang berjumlah 19.773 orang yang meliputi nelayan juragan dan nelayan pandega dan untuk nelayan juragan yang berjumlah 3.761 orang serta untuk nelayan pandega yang berjumlah 15.002 orang. Serta untuk bakul ikan pada tahun 2011 yang berjumlah 1.466 orang. Dengan melihat kondisi yang demikian kelautan bisa diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.

d. Jumlah Alat Tangkap.

Tahun 2011 terdapat alat tangkap untuk mencari ikan di laut yang jenis dan jumlahnya sebagai berikut: Untuk alat purse seine yang berjumlah 568, untuk alat tangkap untuk mencari ikan dengan jenis alat dogol yang berjumlah 1.368 , peralatan untuk menangkap ikan dengan jenis payang yang jumlahnya 66, untuk peralatan untuk menangkap ikan dengan jenis cantrang yang jumlahnya 246, untuk peralatan penangkapan ikan dengan jenis gill net yang jumlahnya 4.598, peralatan untuk menangkap ikan dengan jenis trammel net yang jumlahnya meliputi 1.975, peralatan untuk menangkap ikan dengan jenis pancing yang jumlahnya meliputi 159, dan peralatan untuk menangkap ikan dengan jenis yang lainnya yang jumlahnya meliputi 405 buah.

e. Jumlah Armada Penangkapan Ikan.

Tahun 2011 terdapat jumlah armada penangkapan ikan yang jumlahnya meliputi : Kapal motor lebih dari 60 *gross tonage* yang jumlahnya meliputi 22, kapal motor 30 sampai dengan 60 *gross tonage* yang jumlahnya meliputi 181, kapal motor 10 sampai dengan 30 *gross tonage* yang jumlahnya meliputi 559, kapal motor yang beratnya 5 sampai dengan 10 *gross tonage* yang jumlahnya meliputi 706, kapal motor yang beratnya kurang dari 5 *gross tonage* yang jumlahnya meliputi 3.183, dan perahu layar yang jumlahnya meliputi 15 buah. Dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti tersebut di atas maka dapat dihasilkan produksi perikanan laut yang tidak sedikit jumlahnya. Produksi perikanan laut di Kabupaten Rembang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan, yang kemudian dilelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dari hasil pelelangan tersebut maka diperoleh nilai produksi ikan atau raman, di mana nilai ini mempunyai pengaruh terhadap tingkat perolehan pendapatan nelayan. Nilai produksi ini juga dipengaruhi oleh jenis ikan yang ditangkap. Semakin tinggi nilai ekonomis ikan tersebut, semakin tinggi pula nilai jualnya. Jenis ikan yang paling banyak terdapat di perairan Rembang berdasarkan hasil penangkapan nelayan adalah ikan layang, yang kemudian disusul dengan ikan tembang/jui, ikan selar dan ikan kembung, yang kesemuanya merupakan ikan dari jenis pelagis kecil. Hasil produksi tangkap ini kemudian digunakan sebagai bahan baku dari pengolahan ikan

Usaha pengolahan ikan terdiri dari usaha pengeringan ikan, pemindangan, kerupuk, terasi, dan masih banyak lagi yang semuanya dapat dikategorikan dalam pengolahan tradisional. Kemudian dalam program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dilaksanakan kegiatan untuk

meningkatkan kualitas produk olahan tersebut, diantaranya dengan memberikan bantuan peralatan dan juga pelatihan kepada para pengolah ikan. Pemasaran produk olahan ini sebenarnya sudah mencapai luar daerah, bahkan sudah mencapai luar negeri.

f. Usaha Perikanan.

Usaha pengolahan ikan terdiri dari usaha pengeringan ikan, pemindangan, kerupuk, terasi, dan masih banyak lagi yang semuanya dapat dikategorikan dalam pengolahan tradisional. Kemudian dalam program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas produk olahan tersebut, diantaranya dengan memberikan bantuan peralatan dan juga pelatihan kepada para pengolah ikan. Pemasaran produk olahan ini sebenarnya sudah mencapai luar daerah Kabupaten Rembang, bahkan sudah mencapai luar negeri. Akan tetapi belum ada pengelolaan yang ditangani oleh para pengolah itu sendiri dalam memasarkan produknya. Pada umumnya mereka mengirim produknya yang siap ekspor ke distributor di Surabaya baru kemudian dikirim keluar negeri dengan label dan kemasan lain yang lebih baik.

g. Budidaya Laut,Tambak Dan Kolam

Kegiatan budidaya ikan dilaksanakan melalui kegiatan budidaya ikan kolam dan budidaya ikan tambak, dan akhir-akhir ini sedang dikembangkan usaha budidaya rumput laut. Budidaya kolam maupun tambak mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan lagi, mengingat lahan potensi yang belum diolah masih cukup luas. Kegiatan budidaya laut saat ini sedang dalam taraf uji coba budidaya ikan kerupu di karamba jaring apung dan tanaman rumput laut, yang dilaksanakan pada akhir tahun

anggaran 2002 dengan dana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk budidaya laut, terdapat kurang lebih 25 KJA yang berada di Kecamatan Rembang dengan jenis kegiatan budidaya ikan Karapu (Karamba Jaring Apung) dan beberapa kegiatan budidaya tanaman rumput laut di Kecamatan Kaliori dan Sluke.

h. Pengolahan Ikan.

Potensi perikanan tangkap mencapai 32,370.00 ton per tahun. Terdapat dua daerah sentra perikanan, yaitu di wilayah kecamatan Rembang dan Lasem. Ada sebanyak 16.100 nelayan dengan armada penangkapan sebanyak 2.015 unit, serta 13 tempat pelelangan ikan (TPI) yang tersebar pada 5 Kecamatan. Pemasaran hasil pengolahan ikan tersebar hampir di berbagai wilayah Indonesia, yaitu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra, Sulawesi, Bali, Kalimantan. Pemasaran ekspor ke China, Korea, Malaysia, Singapura, Colombo (Srilangka), Spanyol dan beberapa negara lainnya. Dengan besarnya potensi perikanan, maka pengolahan ikan juga besar potensinya. Pengolahan ikan merupakan aktifitas yang sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Rembang. Sistem pengolahan yang digunakan sampai saat ini mayoritas menggunakan cara lama , dengan sedikit perubahan peralatan yang digunakan. Sentra-sentra pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Rembang, Lasem dan Bonang. Jenis-jenis pengolahan ikan yang banyak terdapat di wilayah ini adalah pengeringan (asin), pemindangan, pengasapan, peragian (terasi) dan produk ikan segar. Seluruhnya terdapat sekitar 767 unit usaha pengolahan dengan omset per tahun mencapai Rp. 166.566.700.000,- dengan total aset sebesar Rp. 38.301.000.000,- dan melibatkan sebanyak 6.579 tenaga kerja.

Sebagian besar pengolah tersebut memiliki skala usaha mikro atau rumah tangga, yaitu sebanyak 664 unit usaha yang bergerak dibidang pengolahan penggaraman (pengeringan), pemindangan, pengasapan, peragian (terasi), pereduksian, surimi (daging ikan giling), penjualan ikan segar, pembekuan dan jenis lainnya seperti pengolahan rajungan, Setiap jenis pengolahan memiliki persoalan masing-masing, baik dari persoalan bahan baku, teknis pengolahan, sarana prasarana, tenaga kerja, permodalan, serta pemasaran. Selain itu, dari skala usaha yang berbeda juga memiliki persoalan yang berbeda-beda. Kebanyakan yang memiliki persoalan lebih banyak adalah skala usaha kecil dan mikro, dimana biasanya terdapat persoalan permodalan, higienitas, bahan baku, dan sistem pemasaran yang memberikan beban tambahan bagi pengolah. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan pengaruh dalam keberlangsungan usaha mereka.

Selama ini para pengusaha / pengolah ikan lebih banyak bertahan karena usaha sendiri dan mereka telah memiliki jaringan tersendiri baik dalam penyediaan bahan baku, teknologi maupun pasar. Di sisi lain, setiap jenis pengolahan ikan memiliki permasalahan tersendiri baik dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi maupun pasarnya.

i. Unit Pengolahan Ikan.

Pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang terdapat jenis ikan olahan yang meliputi sebagai berikut : teri nasi yng jumlahnya meliputi 25.405 unit orang, jumlah pengolahan ikan pemindangan yang jumlahnya meliputi 5.094.945 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan pengeringan/pengasinan yang jumlahnya meliputi 99.311.118 unit orang, jumlah pengolahan ikan dengan jenis pedo yang jumlahnya meliputi 38.238 unit orang,

jumlah jenis pengolahan ikan jambal yang jumlahnya meliputi 2.098 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan pengasapan yang jumlahnya meliputi 5.581.125 unit orang, jumlah pengolahan ikan dengan jenis terasi yang jumlahnya meliputi 163.483 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan kerupuk yang jumlahnya meliputi 176.490 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan petis yang jumlahnya meliputi 115.294 unit orang, jumlah pengolahan ikan dengan jenis presto dengan jumlah yang meliputi 3.296 unit orang, jumlah jenis pengolahan tepung ikan yang jumlahnya 30.152 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan pengalengan ikan yang jumlahnya 195 unit orang, jumlah jenis pengolahan ikan pembekuan yang jumlahnya 22.988 unit orang, dan

jumlah jenis hasil pengolahan ikan lain-lain (aneka produk) yang jumlahnya 12.640 unit orang. Jumlah seluruhnya hasil pengolahan ikan pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang 269.421.167 unit orang, yang terdiri Pengeringan, Pemindang, Peragian.

j. Kawasan Pesisir

Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir seluas 355,95 km² atau sekitar 35% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Wilayah pesisir Kabupaten Rembang dimanfaatkan untuk lahan pertambakan, mangrove/payau, wisata pantai dan juga terumbu karang. Di samping itu di wilayah perairan Kabupaten Rembang terdapat 19 gugusan terumbu karang sebagaimana dibawah ini :

Tabel 1. Potensi terumbu karang di Kabupaten Rembang

No	Nama	Luas (Ha)	No	Nama	Luas (Ha)
1	Karang Gondoh	9,0	11	Karang Pulau Wen Wen	4,2
2	Karang Pulau Marongan	60,0	12	Karang Pulau Masaran	6,9
3	Karang Pulau Benowo	2,4	13	Karang Pulau Dorangan	10,0
4	Karang Pulau Gede	37,0	14	Karang Seliro	6,0
5	Karang Pulau Cilik	7,0	15	Karang Moro	6,0
6	Karang Pulau Tubanan	1,0	16	Karang Pulau Guritan	3,8
7	Karang Pulau Tapa	1,0	17	Karang Siwalan	20,0
8	Karang Pulau Pinggir	1,0	18	Karang Jetak	21,0
9	Karang Pulau	19,6	19	Karang Gosong	4,7
10	Karang Pulau Kelem	7,1			

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang

Pengelolaan kawasan pesisir ini menjadi perhatian utama mengingat kawasan ini mengalami tingkat kerusakan yang cukup signifikan padahal sesungguhnya kawasan ini mempunyai peran besar dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan. Misalnya kawasan terumbu karang. Kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya serta berbiaknya beberapa jenis ikan. Sedangkan kawasan pantai atau mangrove menjadi kawasan untuk benih-benih ikan untuk tumbuh (*spawning*)

sebelum kemudian mereka menuju ke laut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kawasan pesisir mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pelestarian sumberdaya alam. Kawasan pesisir ini dapat juga dikatakan meliputi pulau-pulau kecil dan kawasan terumbu karang, di mana kawasan ini berpotensi untuk pengembangan pada sektor pariwisata, konservasi dan budidaya perikanan. Sebagai contoh terumbu karang Pulau Marongan dan Pulau Gede yang

digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan dan rumput laut. Terumbu karang sendiri merupakan koloni binatang dengan laju pertumbuhan antara 0,1 cm/tahun untuk karang cabang (*soft coral*). Keberadaan terumbu karang itu sendiri dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang laut, pencegah abrasi dan tempat hidup jenis ikan hias dan rumput laut. Di samping kawasan terumbu karang, kawasan yang juga menjadi kawasan potensi konservasi adalah kawasan bakau, yang merupakan kawasan penting bagi beberapa jenis ikan untuk berkembang biak. Di samping itu dengan ditanamnya bakau di pantai perairan Rembang akan dapat mengurangi abrasi yang mungkin akan terjadi pada saat laut pasang dan ombak besar. Penanaman bakau ini terkait erat dengan komunitas mangrove. Di Kabupaten Rembang terdapat komunitas mangrove yang cukup luas, yang tersebar di tiga wilayah kecamatan pantai, yaitu Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Di Kecamatan Kaliori, komunitas mangrove ini dapat ditemui di desa Tunggulsari dan desa Tambakagung dengan areal komunitas seluas 4,2 Ha dengan panjang hamparan hamparan sekitar 2 km dan tebal 2 m. Di Kecamatan Rembang, komunitas mangrove dapat dijumpai di Desa Kabongan Lor, Tireman dan Pasar Banggi dengan luas sekitar 15 Ha, dengan panjang hamparan 3 km dan rata-rata ketebalan 50 m. Sedangkan di Kecamatan Lasem, komunitas mangrove ini dapat ditemui di Desa Gedongmulyo, Dasun, Tasiksono dan Bonang dengan luas komunitas sekitar 5,6 Ha dengan panjang hamparan sekitar 2,8 km dan ketebalan 20 m.

k. Permasalahan Nelayan

(1) Teknologi penangkapan yang masih tradisional

Meskipun jumlah armada penangkapan ikan yang mencapai 412.702

unit pada tahun 1998 dan ini terbilang besar, namun komposisi armada penangkapan itu masih didominasi oleh armada perikanan kecil. Jumlah armada di atas terdiri dari Perahu Tanpa Motor sebanyak 54 %, Motor Tempel 25 % dan Kapal Motor 21 %. Dengan struktur armada seperti itu akan sulit diharapkan produksi perikanan laut Indonesia dapat ditingkatkan dengan cepat. Perahu Tanpa Motor dan Motor Tempel hanya mampu beroperasi di perairan pantai. Hal ini membawa implikasi pada (i) produksi yang rendah akibat produktifitas yang rendah, (ii) kemungkinan terjadinya overfishing di perairan pantai akibat kepadatan tangkap yang tinggi dan (iii) potensi konflik antar nelayan akibat kepadatan yang tinggi dan perluasan daerah tangkap yang hanya bersifat horizontal (keperairan wilayah tetangga) dan tidak vertikal. Penurunan produktivitas dipahami mengingat usaha penangkapan terkonsentrasi di daerah pantai dengan upaya penangkapan yang semakin banyak dan intensif, sementara potensi sumberdaya ikan di daerah tersebut cenderung mengalami penurunan.

Armada penangkapan yang relatif besar pun yang berupa Kapal Motor masih didominasi armada dengan ukuran di bawah 5 GT (67 %) dan hanya 0,18 % armada penangkapan dengan ukuran di atas 200 GT. Artinya bahwa jangkauan kapal-kapal tersebut juga masih terbatas. Padahal salah satu alternatif untuk mengatasi *over fishing* di perairan pantai dan peningkatan produksi perikanan laut adalah mengarahkan target penangkapan ke perairan Zona Ekonomi Ekslusif yang memang belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan keterbatasan kapasitas armada dan alat tangkap diatas menyebabkan tingkat produktifitas nelayan yang rendah. Pada tahun 1998, produktifitas nelayan Indonesia hanya 1,64 ton/orang/tahun atau 5,46

kg/orang/hari (dengan asumsi 300 hari kerja dalam setahun). Meskipun di beberapa daerah kehidupan mereka telah mengalami kemajuan, namun sebagian besar terutama nelayan buruh hidup dalam gelimang kemiskinan dimana kebutuhan sehari-hari pun kadang tidak terpenuhi. Ditambah lagi margin keuntungan dari usaha penangkapan ikan lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak di luar nelayan seperti para tengkulak, pedagang tingkat lokal sampai pedagang tingkat internasional. Menurut Damanhuri dalam Satria (2001), margin keuntungan yang diterima nelayan hanya sekitar 5 %.

(2) Modal yang tidak memadai

Tidak berkembangnya usaha perikanan tangkap secara optimal salah satunya karena keterbatasan modal baik modal investasi maupun modal usaha. Padahal apabila dilihat dari kebutuhan modal yang diperlukan, usaha penangkapan ikan membutuhkan modal yang relatif besar, misalnya bila dibandingkan dengan usaha pertanian tanaman pangan. Beberapa permasalahan permodalan di dalam usaha penangkapan ikan adalah :

1) Keterikatan dengan juragan/pemilik kapal

Bentuk keterikatan ini sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar dilihat dari segi ekonomi kelembagaan mengingat bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan yang paling optimal selama ini dilaksanakan. Pada dasarnya sebagian besar bentuk kelembagaan yang berkembang di masyarakat nelayan sebagian besar merupakan bentuk kelembagaan non pasar melalui suatu hubungan kontrak (*contractual arrangement*) yang dalam kerangka ekonomi kelembagaan mengikuti bentuk hubungan principal –agent yaitu suatu hubungan antara dua atau lebih individu atau kelompok dimana yang satu dinamakan principal dan yang lain

dinamakan agent. Hubungan principal-agent menekankan perhatian pada suatu rancangan struktur insentif untuk suatu tujuan efisiensi pada keadaan informasi yang asimetris (*asymmetric information*). Sistem kontrak (*contractual arrangement*) merupakan solusi dari hubungan ini yang membawa agent ke dalam suatu bentuk kerjasama dengan principal. Principal setuju memberikan suatu insentif tertentu kepada agent, di lain pihak agent setuju melakukan tindakan atas nama dan untuk kepentingan *principal*.

Pada perikanan tangkap yang bertindak sebagai principal biasanya adalah pedagang yang terkadang juga bertindak sebagai juragan/pemilik kapal dan nelayan bertindak sebagai agent. Diantara juragan dan nelayan telah ada suatu persetujuan/komitmen yang mengatur hak dan kewajiban diantara keduanya. Perlunya persetujuan ini didasarkan pada fakta bahwa pada dasarnya antara kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Keadaan demikian selanjutnya akan mengakibatkan suatu konflik oleh karena setiap individu/kelompok akan memaksimumkan keuntungannya masing masing tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Bentuk hubungan principal-agent dalam kasus juragan – nelayan muncul akibat adanya informasi yang asimetris yang akan berdampak pada pembebanan resiko kegagalan. Informasi yang *asimetris* tersebut disebabkan karena (i) sifat dari sumberdaya ikan sendiri yang tidak pasti (karena keberadaannya di dalam perairan tidak dapat diprediksikan dengan tepat baik jenis maupun jumlahnya (ii) karakteristik dari usaha penangkapan ikan sendiri yang penuh dengan resiko kegagalan. Hal ini terkait dengan faktor-faktor alam yang berada di luar kendali manusia seperti adanya gelombang besar, angin dan keadaan cuaca lainnya yang

memungkinkan terjadinya kegagalan dalam usaha penangkapan ikan itu sendiri.

Untuk mengatasi berbagai resiko tersebut, maka persetujuan antara *principal* dan *agent* (juragan kapal dan nelayan) akan dilakukan dengan melibatkan mekanisme kelembagaan transaksi yang berfungsi ganda dimana didalamnya paling tidak terdapat tiga jenis transaksi secara simultan yaitu (1) pasar kredit, (2) pasar tenaga kerja dan (3) pasar komoditas. Oleh karena itu kelembagaan usaha perikanan tangkap dalam pandangan nelayan, dengan demikian tidak hanya memiliki fungsi untuk mentransaksikan ikan tetapi juga menjadi kelembagaan transaksi jasa yang dibutuhkan nelayan secara simultan. Kredit yang diberikan para juragan pun tidak melalui suatu jalur birokasi yang berbelit dan juga tidak mensyaratkan adanya agunan (*collateral*). Jaminan satu-satunya yang ada adalah usaha penangkapan ikan dari nelayan itu sendiri. Selama nelayan tersebut menjalankan usaha maka kreditpun dengan mudah didapatkan.

Namun demikian, para juragan tidak begitu saja memberikan kredit kepada nelayan tanpa adanya suatu harapan keuntungan yang akan didapatnya. Oleh karena itu dalam persetujuannya, maka dia pun melibatkan transaksi pasar lain yaitu pasar komoditi dalam arti bahwa setiap nelayan yang mendapatkan pinjaman kredit harus menjual hasil tangkapannya kepada mereka dengan harga yang disepakati bersama. Keterkaitan pasar (*market interlinkages*) yang kuat antara transaksi komoditas dengan transaksi lainnya tersebut terkadang tidak dipahami oleh para pengambil kebijakan terutama dalam kebijakan perkreditan bagi nelayan dan menganggap hubungan tersebut hanya dilihat dari sisi negatif. Upaya pengentasan kemiskinan nelayan yang

tanpa memperhatikan aspek tersebut dikhawatirkan akan mengalami kegagalan.

2) Ketidakmampuan perbankan dalam memberikan kredit

Hubungan antara nelayan dengan para pemilik modal/juragan semakin kuat seiring dengan tidak adanya lembaga keuangan terutama formal yang dapat menggantikan peran para juragan tersebut. Dengan metode konservatif yang selama ini diberlakukan oleh lembaga-lembaga keuangan, maka lembaga tersebut akan selalu mengalami berbagai kegagalan. Berdasarkan teori pasar persaingan sempurna (*perfect competitive market*) diasumsikan bahwa "dalam dunia yang sempurna" transaksi ekonomi menggunakan informasi yang diasumsikan tidak meminta biaya (*information is perfect and costless*). Sehingga peranan informasi dalam sistem finansial menjadi pasif, yaitu sumber dana keuangan disediakan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menguntungkan. Namun ternyata, dalam dunia yang sebenarnya (*the real world situation*) informasi tersebut bersifat sangat tidak sempurna dan untuk memperolehnya harus menanggung biaya yang bisa menjadi besar. Dengan demikian maka dalam penyaluran kredit akan menghadapi permasalahan informasi yang asimetris yang harus menanggung beban biaya bagi keperluan monitoring dan verifikasi, serta biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kontrak (*contract enforcement*). Dalam situasi seperti itu, maka alokasi kredit tidak otomatis dialokasikan kepada para penerima yang terbaik. Informasi yang asimetris ini akan menimbulkan berbagai persoalan baik sebelum (*ex-ante*) yaitu kegagalan memilih nasabah (*adverse selection of risk*) maupun sesudah (*ex-post*) diberikan kredit yang berupa kerusakan moral (*moral hazard*) dari peminjam kredit, terjadinya *free rider*

yang mencari kesempatan di dalam kesempitan tanpa mau membayar resiko, dan insentif yang salah arah (*incentive incompatibility*).

Dalam kondisi ketiadaan informasi yang penuh (*the absence of full information*) pasar kredit yang demikian, maka bank-bank mengalokasikan kreditnya kepada orang atau perusahaan tertentu yang dinilai mampu mengembalikan kredit tersebut. Ketiadaan informasi yang mendalam mengenai usaha penangkapan ikan menyebabkan pihak perbankan tidak tertarik untuk memberikan kredit kepada para nelayan. Karena pihak perbankan beranggapan bahwa usaha penangkapan ikan mempunyai potensi kegagalan yang tinggi yang diakibatkan oleh karakteristik dari sumberdaya perikanan itu sendiri yang memang tidak dapat diketahui dengan pasti keberadaannya maupun dominannya faktor alam (badai, gelombang dan lain-lain) dalam mempengaruhi usaha penangkapan ikan. Kalaupun pihak perbankan akan menyalurkan kreditnya pada usaha penangkapan ikan, maka –sebagaimana ditujukan untuk nasabah konvensional – mereka menetapkan syarat adanya agunan (*collateral*) dan tingkat suku bunga yang tinggi yang menjadi jaminan terbayarnya kredit yang mereka berikan. Padahal justru hal tersebut merupakan titik lemah masyarakat nelayan di Indonesia. Jangankan mempunyai aset untuk dijadikan agunan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun terkadang mengalami kesulitan. Kalaupun mereka mempunyai aset, hal itu tidak mencukupi untuk dijadikan jaminan.

Dari sisi nelayan sendiri, tidak tertarik meminjam kredit ke bank, di samping karena alasan di atas (agunan dan bunga yang tinggi), mereka merasakan bahwa prosedur perbankan yang terlalu rumit dan berbelit belit, proses yang lama pencairan yang lama. Kalaupun mereka

mendapatkan kredit tersebut, jumlah kredit yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan mereka sehingga kredit tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya investasi maupun biaya operasional penangkapan ikan.

3) Kegagalan program pemerintah memberikan sistem kredit

Telah banyak program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu permodalan di pedesaan termasuk untuk desa pesisir dimana sebagian besar berusaha di bidang penangkapan ikan. Program-program pemerintah tersebut diantaranya adalah program Bimas, KUT, KCK, Kupedes dan lain-lain. Namun demikian dalam perjalannya program-program tersebut mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga-lembaga pemerintah tersebut untuk memahami perilaku dan karakteristik dari masyarakat pedesaan itu sendiri. Hal ini berakibat pada tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku masyarakat peminjam tersebut, belum lagi persoalan pengelola program yang sering melakukan berbagai kerusakan moral (*moral hazard*). Kebijakan lain yang diterapkan pemerintah adalah dengan adanya bantuan kredit murah yang disubsidi maupun bantuan yang bersifat bergulir. Pada awalnya program-program tersebut diperuntukkan bagi kelompok sasaran (*target group*) golongan masyarakat lemah dan miskin. Namun dalam pelaksanaannya terjadi bias karena yang menikmati program-program tersebut hanyalah kelompok masyarakat menengah ke atas yang berada di wilayah pedesaan seperti juragan kapal, pedagang pengumpul dan lain-lain. Lagi-lagi permasalahannya adalah bahwa program-program tersebut mensyaratkan pengembalian sesuai dengan jangka waktu program. Padahal apabila dilihat dari kelancaran usaha dan kemampuan

mengembalikan pinjaman, maka golongan masyarakat menengah dan atas lebih berpeluang untuk mendapatkannya.

Di samping itu, kebijakan bantuan kredit pemerintah di masa lalu selalu dilakukan dengan penyeragaman tanpa melihat bentuk dan karakteristik usaha kelompok Sasaran. Apabila diperhatikan kebutuhan modal nelayan untuk menangkap ikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usaha-usaha pertanian lainnya. Sayangnya, pemberian kredit untuk kedua usaha tersebut terkadang disamaratakan. Hal ini berakibat pada tidak digunakannya kredit yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif penangkapan ikan. Budaya konsumerisme dan kesulitan dalam pemupukan modal. Kondisi ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada saat puncak ikan dimana para nelayan mendapatkan hasil yang cukup besar, sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan saat itu juga. Budaya konsumersisme di kalangan nelayan cukup tinggi. Di sisi lain, ketika musim paceklik ikan, mereka mengalami kesulitan keuangan bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri sekalipun. Implikasi lebih lanjut dari budaya konsumerisme di atas adalah upaya pengembangan usaha lewat pemupukan modal melalui tabungan belum menjadi suatu kebiasaan nelayan. Kesulitan dalam hal permodalan baik untuk investasi maupun operasional melaut, mereka atasi dengan meninjam kepada para tengkulak. Tentu saja hal ini membebani nelayan karena imbalannya adalah mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada para tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan.

(4) Sumberdaya Manusia

Secara kuantitas jumlah nelayan Indonesia terus mengalami peningkatan. Selama periode 1989-1998, jumlah tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata

5 %/tahun. Pada tahun 1998, nelayan perikanan laut berjumlah 2.274.629 orang yang terdiri dari nelayan penuh (20,51 %), nelayan sambilan utama (34,53 %) dan nelayan sambilan tambahan (14,76). Nelayan-nelayan tersebut masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu terutama pada wilayah dimana perairan pantai cukup dominan. Jumlah nelayan terbesar terdapat di wilayah Utara Jawa yang mencapai 541.580 orang atau 23,8 %. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar nelayan Indonesia merupakan tamatan SD bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sekalipun. Hal ini tentu saja berimplikasi pada tingkat penerimaan nelayan terhadap teknologi baru yang rendah meskipun pada hakekatnya untuk membantu mereka sekalipun. Apalagi terhadap penguasaan teknologi-teknologi maju dan canggih yang dapat meningkatkan produktifitas penangkapan mereka. Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap produk-produk hukum yang mengatur usaha penangkapan ikan. Hal ini terlihat dengan tidak efektifnya penerapan jalur-jalur penangkapan yang dibuat pemerintah. Demikian pula halnya dengan penerapan UU no. 22 tahun 1999 dimana penafsiran yang keliru terhadap UU tersebut sering menimbulkan konflik antar nelayan antar daerah maupun antar alat tangkap yang berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan pada pembahasan di atas, penyusun kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbagai kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Daerah di sektor perikanan ternyata tidak selalu menguntungkan bagi nelayan;
2. Kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang

- diimplementasikan oleh nelayan/perusahaan perikanan, sebagian besar ternyata masih di bawah wewenang dan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan Dan Kelautan
- 3. Belum adanya sarana prasarana yang mudah di akses nelayan/perusahaan perikanan, di samping peningkatan pengetahuan/keterampilan mereka dalam mengolah hasil tangkapan.
 - 4. Kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberantasan pencurian ikan pada dasarnya sudah banyak dan dalam pelaksanannya belum memberikan hasil yang memadai karena itu pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten dan konsekuensi;
 - 5. Kebijakan Kementerian Perikanan Dan Kelautan (KKP) dalam memberikan intensif bagi usaha memberi peluang pengusaha perikanan belum menyentuh nelayan kecil, terutama bagi para buruh nelayan, selama ini bantuan dari pemerintah yang berupa permodalan maupun peralatan yang berupa mesin kapal, alat tangkap, perahu, dan jaring yang memperoleh justru para nelayan juragan yang sudah kondisi perekonomiannya sangat maju, sedangkan yang nelayan buruh tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, hal ini pemerintah tidak pernah memberikan kepercayaan kepada buruh nelayan, karena tidak ada kepercayaan dari pemerintah akhirnya kondisi buuh nelayan tidak dapat sejahtera, tetapi menanggung hutang yang banyak sekali;
 - 6. Untuk meningkatkan kondisi perikanan laut di Kabupaten Rembang, perlu adanya kerjasama antara Dinas Perikanan Dan Kelautan dengan petugas penyuluhan lapangan,
 - 7. Untuk meningkatkan kondisi usaha perikanan di Kabupaten Rembang, perlu adanya pembinaan kepada para nelayan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan menyangkut jumlah produksi dan mutu produksi, sehingga konsumen merasa dilayani dengan baik, dan tidak merasa takut untuk dikonsumsi dengan terus menerus, karena masyarakat sangat membutuhkan pengolah ikan untuk pertumbuhan bagi keluarganya dengan harga murah dan terjangkau bagi masyarakat;.
 - 8. Tidak berkembangnya usaha perikanan tangkap secara optimal salah satunya karena keterbatasan modal baik modal investasi maupun modal usaha. Padahal apabila dilihat dari kebutuhan modal yang diperlukan, usaha penangkapan ikan membutuhkan modal yang relatif besar, misalnya bila dibandingkan dengan usaha pertanian tanaman pangan;
 - 9. Keterbatasan kapasitas armada dan alat tangkap menyebabkan tingkat produktifitas nelayan yang rendah. Pada tahun 2011, produktifitas nelayan Kabupaten Rembang hanya 1,64 ton/orang/tahun atau 5,46 kg/orang/hari (dengan asumsi 300 hari kerja dalam setahun). Meskipun di beberapa daerah kehidupan mereka telah mengalami kemajuan, namun sebagian besar terutama nelayan buruh hidup dalam gelimang kemiskinan dimana kebutuhan sehari-hari pun kadang tidak terpenuhi;
 - 10. Sebagian besar nelayan Kabupaten Rembang merupakan tamatan SD bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sekalipun. Hal ini tentu saja berimplikasi pada tingkat

penerimaan nelayan terhadap teknologi baru yang rendah meskipun pada hakikatnya untuk membantu mereka sekalipun. Apalagi terhadap penguasaan teknologi-teknologi maju dan canggih yang dapat meningkatkan produktifitas penangkapan mereka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lebih memprioritaskan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap, antara lain pembangunan sarana jalan, pemukiman nelayan dan penyediaan air bersih, peningkatan akses terhadap permodalan dan penyediaan skim kredit, penata ruang, dan pengembangan informasi pasar diserahkan pengelolannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, sementara Perintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perikanan Dan Kelautan bertindak sebagai fasilitator;
2. Optimalisasi perlu pula di lakukan pada pemasaran melalui peningkatan mutu produk dengan penggunaan teknologi perikanan yang lebih maju lagi, dan mudah untuk memperolehnya dipasaran dengan harga yang terjangkau, disertai dengan suku cadangnya yang mudah diperoleh;
3. Penyelesaian masalah bilateral yang saling menguntungkan dengan negara importir, seperti Uni Eropa;
4. Upaya pemberantasan pencurian ikan terutama oleh negara asing, harus dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dalam hal pemantauan (*monitoring*) melalui penggunaan teknologi yang lebih maju di samping pelaksanaan peraturan (perizinan) yang lebih tegas dan benar yang berkaitan dengan penangkapan ikan di

laut, terutama peralatan yang digunakan;

5. Sebaiknya pemerintah memperhatikan bagaimana cara memberdayakan nelayan dengan baik, mulai dari pemberian modal, bantuan alat tangkap sampai dangan memberikan pelatihan serta memberikan pengawasan khus terhadap nelayan agar pemerintah dapat mengetahui msalah-masalah yang terjadi di kalangan nelayan;
6. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat nelayan, karena Selama ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepenuhnya menguntungkan nelayan dan kebijakan yang di buat pun belum berjalan efektif, salah satuh contoh kegagalan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah larangan penggunaan jaring trawl, yang mana trawl sudah dilarang .

DAFTAR PUSTAKA.

- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang, 2002. *Profil Perikanan Budidaya Kabupaten Rembang*. DKP. Rembang.
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNDIP, 2001. *Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah Bagian Timur (Pati - Rembang)*. Laporan akhir, Bappeda dan FPIK UNDIP. Semarang.
- Pranata, G. 2002. *Kelayakan dan Detail Engineering Pantai Bonang di Kecamatan Lasem*. *Laporan fakta dan Analisis*. Bapeda Rembang Jawa Tengah.
- Setyajit, A.D. 2000. *Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia*. Dinas Perikanan dan

- Kelautan Propinsi Jawa Tengah. Semarang. (<http://kompas.com>).
- Atase Pertanian Perutusan RI-ME, 2005. *Prospek Ekpor Komoditi Perikanan dan Kelautan Indonesia ke Uni Eropa.* Makalah Pada Rakernas Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Badan Riset Kelautan dan Perikanan, 2004. *Indikator Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.* Jakarta.
- Cakrawala, 2004. *Potensi Perikanan Indonesia. Suplemen Perikanan Rakyat Khusus Iptek.* Bandung.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003. *Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Departemen Kelautan Dan Perikanan Tahun 2004.*
- Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2004. *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2002.* Jakarta.
- Ismail, Zarmawis (Penyunting, 2003). *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.* P2E-LIPI. Jakarta.
- Masyhuri (penunting), 2001. *Adaptasi Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia.* Pusat penelitian ekonomi lembaga ilmu pengetahuan indonesia. Jakarta.
- Nadjib, Mohammad, 2003. *Kegiatan Nelayan dan Lingkungan Pesisir.* Dalam Zamarwis Ismail (Penyunting): *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.* P2E-LIPI. Jakarta.
- Puro, Sumpeno, 2001. *Pengolahan Hasil Perikanan Menghadapi Pasar Global-Peluang dan Tantangan.* Makalah pada Seminar Perdagangan Internasional dan Pasca Panen Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta 22-23 Mei 2001.
- Sekretariat Jendral Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2005. *Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan.* Makalah pada Rakernas Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Sumiskun, sumiyaryo, 2005. *Permasalahan Illegal Fishing Dari Perspektif Nelayan dan Pengusaha Perikanan, Serta Upaya Pemberantasannya.* Makalah pada Rakernas Departemen Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.

